



BUPATI PROBOLINGGO

PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO

NOMOR : 70 TAHUN 2015

TENTANG

**BATAS PENGAJUAN UANG PERSEDIAAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO
TAHUN ANGGARAN 2016**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PROBOLINGGO,

Menimbang : Bahwa dalam melaksanakan ketentuan dalam Pasal 201 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Pengajuan Uang Persediaan (UP) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo Tahun Anggaran 2016.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 ;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun Anggaran 2016 ;
11. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 69 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun Anggaran 2016.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS PENGAJUAN UANG PERSEDIAAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN ANGGARAN 2016.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah, adalah Kabupaten Probolinggo.
2. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Probolinggo.
3. Bupati, adalah Bupati Probolinggo.

4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Probolinggo.
6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD, adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
7. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD, adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
8. Bendahara Pengeluaran, adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayar menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
9. Pembantu Bendahara Pengeluaran, adalah orang yang ditunjuk untuk mendukung kelancaran tugas perbendaharaan dan melaksanakan fungsi sebagai kasir, Pembuat Dokumen Pengeluaran Uang atau Pengurusan Gaji.
10. Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP, adalah sejumlah uang tunai yang disediakan untuk SKPD dalam melaksanakan kegiatan operasional sehari-hari.
11. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM, adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh Pengguna Anggaran untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) atas beban pengeluaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD).
12. Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-GU, adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) atas beban pengeluaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) yang dananya dipergunakan untuk mengganti uang persediaan yang telah dibelanjakan.
13. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D, adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.

14. Surat Perintah Pembayaran Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-TU, adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan SKPD yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan uang persediaan.
15. Pengguna Anggaran, adalah pejabat pemegang wewenang pengguna anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
16. Kuasa Pengguna Anggaran, adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.

BAB II UANG PERSEDIAAN

Pasal 2

- (1) SKPD dapat diberikan UP sekali dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) UP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak 1/12 (satu per dua belas) dari Pagu Anggaran Belanja Pegawai dan Belanja Barang serta Jasa yang besarnya sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan peraturan ini.
- (3) UP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Bendahara SKPD untuk dikelola sebagai uang muka kerja.
- (4) Penggunaan UP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikelola oleh Bendahara Pengeluaran.
- (5) UP disimpan pada rekening kas daerah atas nama Bendahara Pengeluaran SKPD.
- (6) Untuk UP termasuk tambahan uang persediaan di SKPD yang nilainya UPnya sampai dengan Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), maka Bendahara Pengeluaran wajib mengendalikan uang tunai (kas tunai) maksimal Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) di brankas.
- (7) Untuk UP termasuk tambahan uang persediaan di SKPD yang nilainya UPnya diatas Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) Bendahara Pengeluaran wajib mengendalikan uang tunai (kas tunai) maksimal Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) di brankas.

- (8) Untuk UP termasuk tambahan uang persediaan di SKPD yang nilainya UPnya diatas Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) sampai dengan Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) Bendahara Pengeluaran wajib mengendalikan uang tunai (kas tunai) maksimal Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) di brankas.
- (9) Untuk UP termasuk tambahan uang persediaan di SKPD yang nilainya UPnya diatas Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) Bendahara Pengeluaran wajib mengendalikan uang tunai (kas tunai) maksimal Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) di brankas.
- (10) Sisa UP pada akhir tahun anggaran harus disetor kembali ke rekening kas daerah paling lambat akhir Desember Tahun Anggaran berkenaan.

BAB III

PENGUNAAN DANA UANG PERSEDIAAN

Pasal 3

UP hanya digunakan untuk jenis pengeluaran yang tidak dapat dilakukan langsung oleh SKPD kepada pihak yang menyediakan barang dan/atau jasa serta Belanja Tidak Langsung dan harus dipertanggungjawabkan.

BAB IV

GANTI UANG PERSEDIAAN

Pasal 4

Penggantian UP dapat dilakukan dengan mengajukan SPM-GU setelah laporan pertanggungjawaban oleh Bendahara Pengeluaran atas Pengajuan Dana SPM UP sebelumnya yang sudah disahkan.

BAB V

TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN

Pasal 5

- (1) Batas jumlah pengajuan SPP-TU harus mendapat persetujuan dari PPKD selaku BUD dengan memperhatikan rincian kebutuhan dan waktu penggunaan.
- (2) Dalam hal dana tambahan uang tidak habis digunakan dalam 1 (satu) bulan, maka sisa tambah uang disetor ke rekening kas umum daerah.
- (3) Ketentuan batas waktu penyetoran sisa tambahan uang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan untuk :
 - a. kegiatan yang pelaksanaannya melebihi 1 (satu) bulan ;
 - b. kegiatan yang mengalami penundaan dari jadwal yang telah ditetapkan yang diakibatkan oleh peristiwa di luar kendali Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
Pada tanggal 15 Desember 2015

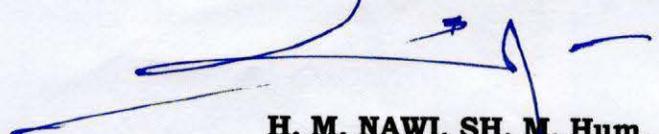
BUPATI PROBOLINGGO



Hj. P. TANTRIANA SARI, SE

Diundangkan dalam Berita Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2015
tanggal 16 Desember 2015 Nomor 70 Seri C1.

Sekretaris Daerah



H. M. NAWI, SH. M. Hum.
Pembina Utama Muda
NIP. 19590527 198503 1

**JUMLAH UANG PERSEDIAAN PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN ANGGARAN 2016**

NO.	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)	PLAFON ANGGARAN BELANJA				BESARNYA UANG PERSEDIAAN
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG DAN JASA	JUMLAH (BELANJA PEGAWAI DAN BELANJA BARANG/JASA)	JUMLAH (BELANJA HIBAH, BANSOS, BANTUAN KEUANGAN DAN BELANJA TIDAK TERDUGA)	
1	2	3	4	5 = (3 + 4)	6	7
1	Dinas Pendidikan	14,687,700,000	29,649,709,050	44,337,409,050	-	1,000,000,000
2	Dinas Kesehatan	5,993,700,000	67,833,653,475	73,827,353,475	-	1,000,000,000
3	RSUD Waluyojati Kraksaan (SKPD)	3,449,725,000	5,818,250,000	9,267,975,000	-	50,000,000
4	RSUD Tongas (SKPD)	979,800,000	1,848,715,000	2,828,515,000	-	235,000,000
5	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga	874,525,000	5,313,201,305	6,187,726,305	-	500,000,000
6	Dinas Pekerjaan Umum Pengairan	892,275,000	16,418,850,000	17,311,125,000	-	650,000,000
7	Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya	555,977,500	31,454,400,430	32,010,377,930	-	650,000,000
8	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	823,665,000	6,770,902,700	7,594,567,700	-	630,000,000
9	Dinas Perhubungan	1,509,550,000	3,581,384,000	5,090,934,000	-	424,000,000
10	Badan Lingkungan Hidup	1,135,050,000	32,514,719,000	33,649,769,000	-	700,000,000
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	863,700,000	4,200,300,000	5,064,000,000	-	400,000,000
12	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana	830,650,000	4,062,735,000	4,893,385,000	-	400,000,000
13	Dinas Sosial	514,210,000	6,239,640,000	6,753,850,000	-	550,000,000
14	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	450,500,000	2,374,925,000	2,825,425,000	-	235,000,000
15	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	630,950,000	6,331,622,500	6,962,572,500	-	580,000,000
16	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	394,050,000	8,184,950,000	8,579,000,000	-	700,000,000
17	Kantor Penanaman Modal dan Perijinan	370,950,000	2,134,050,000	2,505,000,000	-	200,000,000
18	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	401,025,000	2,802,055,000	3,203,080,000	-	265,000,000
19	Kantor Pemuda dan Olah Raga	290,325,000	2,990,657,000	3,280,982,000	-	270,000,000
20	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat	463,100,000	2,830,400,000	3,293,500,000	-	270,000,000
21	Satuan Polisi Pamong Praja	1,234,050,000	3,490,950,000	4,725,000,000	-	350,000,000
22	Bagian Pemerintahan	124,300,000	2,380,900,000	2,505,200,000	-	200,000,000
23	Bagian Hukum	205,950,000	1,736,275,000	1,942,225,000	-	160,000,000
24	Bagian Organisasi	97,500,000	2,203,900,000	2,301,400,000	-	190,000,000
25	Bagian Penyusunan Program	310,550,000	1,747,995,000	2,058,545,000	-	200,000,000
26	Bagian Komunikasi dan Informasi	129,000,000	3,306,000,000	3,435,000,000	-	285,000,000
27	Bagian Kesejahteraan Rakyat	29,275,000	6,743,925,000	6,773,200,000	-	400,000,000
28	Bagian Umum	87,100,000	15,532,875,000	15,619,975,000	-	750,000,000
29	Bagian Protokol dan Rumah Tangga	64,550,000	3,566,900,000	3,631,450,000	-	300,000,000
30	Bagian Pengelolaan dan Pengadaan	387,500,000	4,201,550,000	4,589,050,000	-	380,000,000
31	Sekretariat DPRD	494,375,000	24,486,950,000	24,981,325,000	-	800,000,000
32	Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPD)	963,275,000	6,909,225,000	7,872,500,000	-	650,000,000
33	Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD)	-	-	-	379,982,432,650	300,000,000
34	Dinas Pendapatan	1,086,710,000	6,212,540,000	7,299,250,000	-	600,000,000
35	Inspektorat	411,785,000	3,200,139,000	3,611,924,000	-	300,000,000
36	Badan Kepegawaian Daerah	766,300,000	5,674,668,000	6,440,968,000	-	530,000,000
37	Kecamatan Dringu	121,800,000	401,200,000	523,000,000	-	40,000,000
38	Kecamatan Kraksaan	192,350,000	420,600,000	612,950,000	-	50,000,000
39	Kecamatan Gading	139,900,000	391,600,000	531,500,000	-	40,000,000
40	Kecamatan Lumbang	167,125,000	352,575,000	519,700,000	-	40,000,000
41	Kecamatan Tiris	104,475,000	392,525,000	497,000,000	-	40,000,000
42	Kecamatan Besuk	216,640,000	313,560,000	530,200,000	-	40,000,000
43	Kecamatan Gending	138,600,000	359,650,000	498,250,000	-	40,000,000
44	Kecamatan Krejengan	187,750,000	341,250,000	529,000,000	-	40,000,000
45	Kecamatan Pajarakan	165,575,000	346,555,000	512,130,000	-	40,000,000
46	Kecamatan Sumber	107,550,000	391,840,000	499,390,000	-	40,000,000
47	Kecamatan Krucil	135,200,000	380,200,000	515,400,000	-	40,000,000
48	Kecamatan Tongas	140,650,000	382,100,000	522,750,000	-	40,000,000
49	Kecamatan Tegalsiwalan	182,550,000	343,450,000	526,000,000	-	40,000,000
50	Kecamatan Wonomerto	244,170,000	287,680,000	531,850,000	-	40,000,000
51	Kecamatan Leces	171,200,000	357,300,000	528,500,000	-	40,000,000
52	Kecamatan Sukapura	127,100,000	373,500,000	500,600,000	-	40,000,000

1	2	3	4	5 = (3 + 4)	6	7
53	Kecamatan Maron	140,600,000	393,550,000	534,150,000	-	40,000,000
54	Kecamatan Banyuwang	114,750,000	366,150,000	480,900,000	-	40,000,000
55	Kecamatan Kotaanyar	154,650,000	367,350,000	522,000,000	-	40,000,000
56	Kecamatan Sumberasih	140,750,000	400,450,000	541,200,000	-	40,000,000
57	Kecamatan Kuripan	112,350,000	407,099,800	519,449,800	-	40,000,000
58	Kecamatan Bantaran	107,950,000	391,440,000	499,390,000	-	40,000,000
59	Kecamatan Paiton	177,800,000	337,600,000	515,400,000	-	40,000,000
60	Kecamatan Pakuniran	127,800,000	355,800,000	483,600,000	-	40,000,000
61	Kelurahan Semampir	82,800,000	209,200,000	292,000,000	-	20,000,000
62	Kelurahan Patokan	76,450,000	211,400,000	287,850,000	-	20,000,000
63	Kelurahan Sidomukti	43,050,000	181,876,500	224,926,500	-	20,000,000
64	Kelurahan Kraksaan Wetan	54,300,000	204,500,000	258,800,000	-	20,000,000
65	Kelurahan Kandangjati Kulon	35,250,000	169,310,000	204,560,000	-	20,000,000
66	Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian	487,680,000	6,363,932,810	6,851,612,810	-	500,000,000
67	Badan Pemberdayaan Masyarakat	543,850,000	8,312,610,000	8,856,460,000	-	700,000,000
68	Kantor Arsip Daerah	162,250,000	1,831,250,000	1,993,500,000	-	165,000,000
69	Kantor Perpustakaan Umum Daerah	288,750,000	2,091,034,500	2,379,784,500	-	200,000,000
70	Dinas Pertanian	467,200,000	10,913,407,000	11,380,607,000	-	700,000,000
71	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	535,550,000	6,134,730,000	6,670,280,000	-	550,000,000
72	Dinas Perkebunan dan Kehutanan	195,925,000	9,118,885,000	9,314,810,000	-	700,000,000
73	Dinas Perikanan dan Kelautan	415,600,000	5,594,678,575	6,010,278,575	-	500,000,000
74	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	634,430,000	8,215,374,000	8,849,804,000	-	730,000,000
Jumlah		50,146,017,500	403,157,124,645	453,303,142,145	379,982,432,650	21,919,000,000

BUPATI PROBOLINGGO


HJ. P. TANTRIANA SARI, SE